

**Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu BRI BRIZZI Ditinjau dari UU
No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**
Disusun oleh : Farida Rahma Vita

Abstrak

Pengaruh globalisasi dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi menuntut bank untuk terus berinovasi dan melakukan berbagai pembaharuan, salah satunya dalam alat dan sistem pembayaran. Sistem pembayaran tunai kini telah beralih menjadi sistem pembayaran non tunai karena dirasa lebih efisien. Pada saat ini, alat pembayaran non tunai yang paling banyak diminati adalah uang elektronik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) turut menerbitkan uang elektronik BRIZZI sebagai kartu prabayar multifungsi. Seiring meningkatnya penggunaan BRIZZI, permasalahan terkait penggunaannya seringkali dialami oleh pemegang kartu BRI BRIZZI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan yang digunakan dalam penerbitan produk kartu BRI BRIZZI dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen kartu BRI BRIZZI dalam hal konsumen mengalami kerugian. Hasilnya menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap jasa sistem pembayaran khususnya dalam penyelenggaraan uang elektronik masih menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia sehingga perlu diperkuat. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara kartu BRI BRIZZI dapat melakukan pengembangan terhadap layanannya.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia, Uang Elektronik, Bank Rakyat Indonesia, Kartu BRI BRIZZI

Abstract

Globalization in the information and communication technology requires banks to make innovation and carry out various updates, one of the innovation is payment system and tools. The cash payment system has now turned into a non-cash payment system because it is more efficient. Nowadays, the most preferred non-cash payment instrument is electronic money. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) also contributes to release BRIZZI electronic money as a multifunctional prepaid card. Along with the increasing use of BRIZZI, problems related to its use are often experienced by BRI BRIZZI card holders. This research was conducted to determine the settings used in the issuance of BRIZZI BRI card products and to find out the forms of legal protection against consumers of BRIZZI BRI cards in the event that consumers experience losses. As the result shows that the legal provisions governing the consumer protection against payment system services, especially in the implementation of electronic money, indicate weak consumer protection in Indonesia, which needs to be strengthened. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) as the BRI BRIZZI card organizer can develop its services.

Keywords : Consumer Protection, Bank Indonesia, Electronic Money, Bank Rakyat Indonesia, BRI BRIZZI Card